

MEMBANGUN PERADABAN BANGSA:

Perspektif Sosiologi Agama

Oleh:

Ida Bagus Gde Yudha Triguna

Universitas Hindu Indonesia

e-mail: ajiktriguna@yahoo.com

Abstract

Civilization as a representation of the moral commitment of goodness to its citizens [singular and plural] is then used as a reference in the concept of living together. Meanwhile, It is also the source of appreciation, creativity, and expressing feelings. As a valuable moral commitment, it requires its adherents to nurture, preserve, and interpret it in the best way according to their methodology. The number of ways available to interpret the value have opened up the possibility of polarization of meaning, so it may open the possibility of bias and differences in the interpretation of a value, moreover, if external factors have contributed to the polarization of how to interpret the value.

Kata kunci: National Civilization, Sociology of Religion

Abstrak

Peradaban sebagai representasi komitmen moral yang mengandung kebaikan bagi warganya [singular dan plural] kemudian dijadikan acuan dalam hidup bersama, digunakan sebagai sumber apresiasi, berkreaitivitas, dan mengungkapkan perasaan. Sebagai komitmen moral yang amat berharga, mengharuskan penganutnya untuk memelihara, melestarikan, dan memaknainya dengan cara yang paling baik menurut ukuran mereka. Banyaknya cara yang tersedia untuk memaknai nilai itu, telah membuka peluang adanya polarisasi makna, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya bias dan perbedaan penafsiran terhadap suatu nilai, lebih-lebih jika faktor eksternal telah ikut memberi sinergi terhadap polarisasi cara menafsirkan nilai itu.

Kata kunci: Peradaban Bangsa, Sosiologi Agama

I. PENDAHULUAN

Beberapa ilmuwan abad XVIII dan XIX acap kali membahas masalah kebudayaan dengan cara membedakan “kebudayaan masyarakat nonurban yang dicirikan sebagai primitif serta tidak berubah, sedangkan masyarakat urban yang telah berperadaban, berkembang-dinamis-

lebih kompleks. Terminologi *primery group* berlawanan dengan *scondary group* [C.H. Cooley], *gemeinschaft* berhadapan dengan *Gesselschaft* [F. Tonnies], *solidarite mechanic* lawan dari *solidarite* [E. Durkheim], maupun pandangan P. Sorokin tentang *familistic* berlawanan dengan *Contractual* beberapa ilmuwan yang memiliki pandangan seperti itu. Masyarakat nonurban

dicirikan dengan masyarakat yang homogen, komunal, ritualisme, pimpinan atas wibawa dan karisma, hukum adat bersifat refresif, serta bersifat anonim. Sedangkan masyarakat urban ditandai dengan sifat heterogen, menekankan dimensi humanisme, pimpinan atas dasar kedudukan dan wewenang, hukumnya bersifat restruktif, dan berazas guna.

Cara menjelaskan [dengan mendikotomikan], sesungguhnya dalam rangka membedakan antara kebudayaan dengan peradaban. Kebudayaan maupun peradaban, walaupun sama-sama menunjuk pada seluruh pandangan manusia terpenting dalam suatu masyarakat [nilai, norma, hukum dan aturan khusus], bersifat koersif, dan kontinyu, tetapi peradaban lebih luas-halus, sebagai produk kreativitas [Dawson] atau suatu corak “wilayah” komitmen moral bersama [Durkheim]. Resiko pemetaan secara dikotomis, dapat berarti bahwa peradaban berlawanan dengan “barbarisme”, sehingga berperadaban itu baik, sedangkan tidak berperadaban itu buruk.

II. PEMBAHASAN

2.1 Peradaban Sebagai Inspirasi Dinamis

Peradaban sebagai representasi komitmen moral yang mengandung kebaikan bagi warganya [*singular* dan *plural*] kemudian dijadikan acuan dalam hidup bersama, digunakan sebagai sumber apresiasi, berkreaitivitas, dan mengungkapkan perasaan. Sebagai komitmen moral yang amat berharga, mengharuskan penganutnya untuk memelihara, melestarikan, dan memaknainya dengan cara yang paling baik menurut ukuran mereka. Banyaknya cara yang tersedia untuk memaknai nilai itu, telah membuka peluang adanya polarisasi makna, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya bias dan perbedaan penafsiran terhadap suatu nilai. Lebih-lebih jika faktor eksternal telah ikut memberi sinergi terhadap polarisasi cara menafsirkan nilai itu.

Dari waktu ke waktu berbagai ‘kebutuhan baru’ muncul sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kebutuhan baru itu dalam perjalanannya sebagian telah diadaptasi, diakomodasi, dan dijadikan acuan bersama. Akibatnya, terdapat komitmen moral yang tadinya dirumuskan untuk tujuan baik, dalam kenyataannya telah mengalami benturan dan malahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai, sehingga perlu di-

lakukan peninjauan kembali terhadap substansi, konteks, dan relevansinya. Semua itu merupakan dorongan alamiah yang bersifat internal, yang menandakan bahwa tidak ada satu pihakpun yang terhindar dari proses dinamika dan perubahan, termasuk bagaimana membangun peradaban bangsa [dalam dinamika dunia yang senantiasa berubah].

Setidaknya Morieux dan Tollman dalam *Six Simple Rules: How to Manage Complexity Without Getting Complicated* [2014] menyatakan kompleksitas dalam periode 20-30 tahun mendatang meningkat 35 kali lipat. Artinya, persoalan dan solusi hidup ke depan sebagai persoalan kebudayaan dan peradaban juga meningkat. Oleh karena itu peradaban masa depan adalah peradaban yang menempatkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan “Kekayaan Pengetahuan adalah Tertinggi” [*Vidya dhanam Sarvadhana Pradhanam*], kreativitas dan inovatif, disiplin, kerja keras, dan rendah hati yang dibingkai dengan tatanan nilai untuk berfikir kritis [Daniel H. Pink, 2006] sebagai “senjata” untuk menghasilkan kebudayaan dan peradaban yang senantiasa relevan dengan dinamika.

2.2 Kemenag, Hinduisme, dan Peradaban

Slogan Kementerian Agama yang meletakkan ‘iklas beramal sebagai nilai dalam rangka menjalankan tiga hal penting, yaitu *melayani*, *membina* [*pemberdayaan*], dan membimbing [*meneladani*] adalah sebuah upaya membangun peradaban. Iklas beramal [*lascarya*] hendaknya dimaknai sebagai tindakan kerja tanpa pamrihtanpa motivasi berlebihan terhadap hasil kerja itu sendiri. Bagi saya, budaya kerja yang harus dikembangkan adalah ‘kerja sebagai penanda hidup, mencapai kemuliaan hidup, dan melalui kerja dicapai kelepaan atau penyatuan dengan Tuhan [*mokshartam jagaditta*]. Hanya dengan nilai dasar ini, kita baru akan mampu melakukan pelayanan dengan optimal [*sewaka dharma*]. Dengan demikian, kerja [dalam konteks Tri Dharma Pendidikan Tinggi] seharusnya ditempatkan sebagai *yadnya* karena itu harus dilakukan dengan konsentrasi dan disiplin [Yoga Sutra] atau dalam Yajur Veda, 19:30] berikut.

Pratena diksam apnoti
Diksaya apnoti daksinam
Daksina sraddham apnoti
Sraddhaya satyam apyate

Artinya:

Melalui pengabdian kita memperoleh kesucian,
Dengan kesucian kita mendapat kemuliaan
Dengan kemuliaan kita mendapat kehormatan
Dan dengan kehormatan kita peroleh kebenaran

Bertitik tolak dari kutipan di atas, maka pelayanan yang dilakukan atas dasar rasionalitas, maka di sana akan terselip motivasi pamrih dan berharap – yang menurut saya bukanlah tindakan yang relevan dengan prinsip dasar ‘iklas beramal’ [*lascarya*].

Membangun kebiasaan melayani dengan sepenuh hati [*sewaka dharma*] identik dengan membangun peradaban. Setidaknya ada enam kriteria dasar yang dikembangkan atau 6 [enam] S, dimulai dengan 1] salam, 2] senyum, 3] sapa 4] segera, 5] selesai, dan 6] sukses. Menurut saya, salam itu sebagai penanda ucapan syukur [*astungkara*], bahwa ada ‘utusan’ Tuhan yang datang kepada kita dan karena itu harus disambut dengan syalam dan senyum.

Tentu amat menyedihkan bagi mereka yang dalam masa hidupnya tidak pernah diberi kesempatan bertemu dan didatangi oleh ‘utusan’ Tuhan [baik untuk mengingatkan, menguji, dan memberi rejeki]. Salam dan senyum secara spontan adalah salah satu sikap yang patut dikembangkan dalam kerangka kita melakukan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Memberdayakan [*abhisamdhaka*] menurut saya mengandung makna adanya penghargaan dan pengakuan yang seimbang terhadap eksistensi pihak lain. Memberdayakan juga berarti tidak pernah secara sadar menyakiti pihak lain [*ahimsa*], dan malahan senantiasa berusaha untuk memuliakannya atau dasar prinsip **dia adalah aku** [*tat twam asi*]. Karena itu, memberdayakan harus dimulai dengan sikap kerja hormat kepada sejawat, bersahaja, jujur, beretika, memiliki integritas terhadap pekerjaan, dan disiplin. Dengan sikap kerja seperti itu, diharapkan mampu memberi motivasi dan memberdayakan semua orang [*sarva-abhisamdhaka*].

Meneladani adalah persepsi kerja yang harus ditanamkan dari sejak awal seorang karyawan

dan tenaga edukatif menyatakan dirinya bergabung di STAHN-Gde Pudja [Kemenag] atau institusi lainnya. Dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, maka keteladanan atasan menjadi penting sebagai acuan bawahan. Dalam ajaran Nitisastra [etika kepemimpinan], disebutkan bahwa seorang atasan [pimpinan] harus mampu ‘berbusana’ sebagai berikut.

*‘Busana orang kaya adalah ramah dan buka hati,
Busana orang kuat adalah ucapan halus,
Busana pengetahuan adalah kedamaian,
Busana orang yang belajar buku-buku suci adalah rendah hati,
Busana tapa, yoga, semadi adalah tidak lekas marah,
Busana orang besar adalah pemaaf,
Busana orang belajar agama tidak mencela agama orang lain*

Apa yang dapat diteladani dari seorang pimpinan, jika kikir, tidak terbuka, ucapannya setiap saat kasar-menghardik, pernyataannya senantiasa menimbulkan kegelisahan di lingkungan kerjanya, tinggi hati, setiap saat marah, tidak pernah bersedia memberi maaf, dan selalu mencela agama orang lain. Keteladanan menurut saya memerlukan konsistensi antara apa yang ada dalam pikiran [*manacika*], perkataan [*wacika*], dan perbuatan [*kayika*]. Keteladanan tidak memberi ruang kepada sikap medua, sehingga memberi inspirasi bagi lahirnya kepercayaan [Stephen M.R. Covey dan Rebecca R. Merrill (2006) dalam *The Speed of Trust*].

III. PENUTUP

Dalam kajian kebudayaan, perubahan itu telah memberi kontribusi terhadap pengetahuan anggota komunitas sebagai satuan budaya. Setiap orang yang telah tersentuh sistem pengetahuannya oleh nilai-nilai baru [kreatif-inovatif, disiplin, kerja keras, rendah hati, inklusif] akan mencoba memberi makna baru bagi tatanan yang ada sebelumnya, tidak terkecuali hal-hal yang bersifat normatif seperti nilai dan budaya kerja.

Asumsinya, perubahan secara inheren mengandung proses destrukturisasi, restrukturisasi, dan strukturasi secara silih berganti [Triguna, 1990]. Dalam mekanisme itu terjadi peningka-

tan adaptasi (*adaptive upgrading*) atau adaptasi dengan modifikasi (*adaptive modification*) melalui proses pemahaman dan penafsiran ke arah tingkat abstraksi yang berlaku umum. Usaha penyesuaian itu mengandung arti ganda, yaitu manusia berusaha menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungan. Sebaliknya, manusia berusaha pula menyesuaikan lingkungan dengan keinginan dan tujuan mereka dengan berbagai ikutan aktivitas kebudayaan mereka.

Mengingat lingkungan yang diadaptasi manusia terus berubah, maka dalam upaya adaptasi itu manusia terus mengikuti, mengamati, dan menginterpretasi berbagai gejala dan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan secara dinamis. Jika manusia menganggap cara penyesuaian dan cara memberi arti yang dilakukan sebelumnya kurang relevan, cara itu akan diganti dengan cara yang dianggap lebih cocok, setelah melalui mekanisme *pemahaman* dan so-

sialisasi.

Pemahaman secara cermat mengindikasikan bahwa dalam proses pembudayaan diakui ada aktivitas ‘manipulasi simbolis’ yaitu suatu cara mengedepankan kultur yang relevan dan menyembunyikan yang kurang sesuai dengan situasi yang sedang berkembang. Dengan logika itu, maka penguatan [sosialisasi] budaya kerja hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui media dan pimpinan tradisional.

Pengalaman masa lalu ketika KB mulai diperkenalkan banyak pihak yang menolak atau apriori, tetapi berkah petuah para pimpinan tradisional akhirnya semuanya berjalan sesuai harapan. Demikian juga membangun ‘kebaikan’ dalam kultur ke Indonesiaan, secara sistematis harus terus dilakukan agar terlahir peradaban pendidikan Indonesia yang menyeimbangkan antara akal dan budhi antara pradnyan dan purusotama [Sarasamuccaya sloka 299-313].

DAFTAR PUSTAKA

- CATTON, William, R. Jr. (1966). *From Animistic to Naturalistic Sociology*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Covey, Stephen M.R. dan Merrill Rebecca. 2010. *The Speed of Truth*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Giddens, Anthony. (1967). *Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. New York: Basic Books, Inc.
- Huntington, Samuel. 1993. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*.
- Martindale (1974) *Martindale, Dons. 1974. Sociological Theory and The Problem of Values*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Morieux and Tollman. 2014 *Six Simple Rules: How To Manage Complexity Without Getting Complicated*.
- Wrong, Dennis. (1976). *Sceptical Sociology*. New York: Columbia University.
- Yudha, Triguna. 1992/93. *Sosiologi Agama Hindu*. Modul I Penyetaraan Guru-Guru Agama Hindu se Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.
- , 1997. *Mobilitas Kelas, Konflik, dan Penafsiran Kembali Simbolisme Masyarakat Hindu di Bali*. Bandung: Universitas Pajajaran (Disertasi).
- , (Penyunting). 2000. *Kontribusi Hindu terhadap Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. Denpasar: Vidya Dharma.
- , 2000. *Teori-Teori Simbol*. Denpasar: Vidya Dharma.
- , 2002a. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Bali dalam Dinamika Multikultural*. Makalah Denpasar: Balai Kajian.
- , 2002b. *Reinterpretasi dan Reposisi Adat dan Tradisi dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Makalah Dialog Budaya Regional. Yogyakarta: Direktorat Kepercayaan dan Tradisi Jakarta.
- , 2015. *Pendidikan Pendidikan Karakter Bangsa di Lingkungan Mahasiswa PTS se Kopertis Wilayah VIII di NTT dan NTB*. Kemenristek Dikti, Kopertis VIII.